

**OTONOMI DAERAH DAN DESENTRALISASI DESA MENUJU PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
(Studi Kasus Desa Panca Mulya Kecamatan Sungai Bahar
Kabupaten Muaro Jambi)**

**DIANDA PUTRA.S.AP¹,
Drs. H. MAT RAMAWI, M.M ,EKA SEPTIANI , S.Sos. M.Si**

Email :

dianda.putra@gmail.com

matramawi@gmail.com

ekaseptiani@gmail.com

ABSTRACT

"This study aims to determine Regional Autonomy and village Decentralization Towards Village Community Elmpowerment (Case Study of Desa Panca Mulya Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi). The formulation of the problem proposed is: How Regional Autonomy and Village Decentralization Towards Village, Sungai Bahar Distruct, Muaro Jambi Regency). Human resource development is carried out by the efforts made by always involving community members in every village development activity. Then the economic growth is carried out by striving to increase the economic growth of the community by carrying out counseling and helping to make it easier for the community to get oil palm seeds and fertilizer. Furthermore, equitable development is carried out based on community needs and based on priority scale. In addition, equal distribution of use is carried out by taking into account the balance of physical development and community empowerment development. Likewise, empowerment is carried out by involving all potential communities in every village development activity.

Keyword: Autonomy, Decentralization

ABSTRAK

“Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Desa Panca Mulya Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi). rumusan masalah yang diajukan yaitu : bagaimanakah Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Desa Panca Mulya Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi). Pengembangan sumber daya manusia dilakukan dengan upaya upaya yang dilakukan oleh pemerintahan desa selalu melibatkan anggota masyarakatnya dalam setiap kegiatan pembangunan desa. kemudian pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan mengupayakan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan melaksanakan penyuluhan penyuluhan dan membantu mempermudah masyarakat dalam mendapatkan bibit sawit dan pupuk. selanjutnya pemerataan pembangunan dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan berdasarkan skala prioritas. Disamping itu pemerataan pembangunan dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan pembangunan fisik dan pembangunan pemberdayaan masyarakat. Begitu juga dengan pemberdayaan dilakukan dengan melibatkan seluruh masyarakat yang memiliki potensi dalam setiap kegiatan pembangunan desa.

Kata Kunci: Otonomi, Desentralisasi

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Desentralisasi merupakan sebuah konsep yang mengisyaratkan adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah ditingkat bawah untuk mengurus wilayahnya sendiri. Desentralisasi bertujuan agar pemerintah dapat lebih meningkatkan efisiensi serta efektifitas fungsi-fungsi pelayanannya kepada seluruh lapisan masyarakat. Artinya desentralisasi menunjukkan sebuah bangunan vertikal dari bentuk kekuasaan negara. Di Indonesia dianutnya Desentralisasi kemudian diwujudkan dalam bentuk kebijakan Otonomi Daerah.

Otonomi Daerah pada dasarnya adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hak tersebut diperoleh melalui penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai dengan keadaan dan kemampuan daerah yang bersangkutan. Otonomi Daerah sebagai wujud dari dianutnya asas desentralisasi, diharapkan akan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Karena kewenangan yang diterima oleh daerah melalui adanya Otonomi Daerah, akan memberikan “kebebasan” kepada Daerah. Dalam hal melakukan berbagai tindakan yang diharapkan akan sesuai dengan kondisi serta aspirasi masyarakat di wilayahnya. Anggapan tersebut disebabkan karena secara logis pemerintah daerah lebih dekat kepada masyarakat, sehingga akan lebih tahu apa yang menjadi tuntutan dan keinginan masyarakat.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah kemudian dianggap membawa semangat demokrasi didalamnya karena memuat kebijakan Otonomi Daerah, yang akan memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengatur dan menata rumah tangganya sendiri. Artinya Undang-undang ini kemudian membawa dua hal pokok dalam kehadirannya yakni adanya otonomi daerah yang merupakan konsekuensi logis dari dianutnya asas Desentralisasi, serta adanya jiwa demokratis yang terkandung didalamnya. Namun dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah mengalami 2 kali perubahan yaitu dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah masih ditemukan berbagai kekurangan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang ini juga menyatakan bahwa daerah otonom adalah kewenangan daerah otonom daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan.

Kehadiran kebijakan otonomi daerah yang diterapkan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah mengalami perubahan diharapkan akan memberikan wewenang yang besar kepada daerah untuk mengatur wilayahnya sesuai dengan aspirasi masyarakatnya. Undang-undang ini dianggap berwatak demokratis karena didalamnya memuat aturan yang dianggap akan memberikan jalan bagi terjadinya proses pemberdayaan bagi masyarakat di daerah termasuk masyarakat desa. Karena undang-undang ini juga memuat kebijakan mengenai desa yang mengarah kepada adanya otonomi desa yang luas. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Permasalahannya kemudian apakah kehadiran otonomi desa beserta segala implikasinya menjamin terwujudnya demokratisasi bagi masyarakat desa menuju kepada sebuah kondisi yang dapat menunjang lahirnya kemampuan masyarakat untuk dapat

mendorong segala proses demokrasi diwilayahnya sedapat mungkin dengan kemampuannya sendiri dalam sebuah skema kebijakan otonomi. Permasalahan selanjutnya apakah kehadiran Badan Permusyawaratan Desa yang ada dalam skema otonomi desa saat ini telah menjadi jawaban atas berbagai kendala serta permasalahan mengenai keterlibatan masyarakat desa dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial maupun politik yang dirasakan selama ini.

Tulisan ini akan memberikan gambaran umum atau pandangan awal serta analisa mengenai upaya pemberdayaan masyarakat desa menuju demokratisasi desa dalam skema pelaksanaan otonomi daerah. sebagai fokusnya adalah pelaksanaan otonomi desa secara umum serta beberapa hal terkait kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah yang dapat mendorong sekaligus memfasilitasi upaya pemberdayaan masyarakat desa menuju masyarakat desa yang lebih demokratis dan respon masyarakat desa terhadap berbagai upaya berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat desa melalui berbagai peraturan daerah.

Sementara itu berdasarkan pengamatan awal atau fenomena dilapanagn adalah, dimana otonomi daerah yang berimplikasi kepada otonomi desa, menjadikan pemerintahan desa justru tidak mencerminkan demokrasi yang baik. Hal ini lebih disebabkan karena perbedaan konsep dan kepentingan antara pemerintah desa, BPD dan masyarakat itu sendiri. Dengan adanya persoalan seperti ini menyebabkan sering kali terjadi konflik internal didesa terutama antara pemerintah desa dengan BPD.

Disamping itu penulis juga melihat, dimana masih kurangnya pemahaman pemerintah desa tentang persoalan desentralisasi. Hal ini dapat dilihat seringnya desa diinterpensi oleh pihak kecamatan sebagai mediator dan fasilitator antara pemerintahan desa dengan pemerintah daerah. Tapi justru yang terjadi pihak kecamatan sering melimpahkan tugas-tugas kepada pihak pemerintah desa. Sementara dari pemerintah desa justru terkesan seakan-akan mengamini atau menganggap hal tersebut seakan-akan merupakan kewajiban pemerintah desa yang harus dilaksanakan.

Sehubungan dengan fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang dituangkan dengan judul **“OTONOMI DAERAH DAN DESENTRALISASI DESA MENUJU PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (Studi Kasus Desa Panca Mulya Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi)”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah yaitu Bagaimanakah Pelaksanaan Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa Panca Mulya Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, adapun penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Pelaksanaan Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa Panca Mulya Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1. Manfaat Akademik

Adapun manfaat akademis dalam penelitian ini yaitu :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai Pelaksanaan Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa Panca Mulya.

- b. Bagi penulis, sebagai salah satu tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan, serta sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan S1 guna mendapatkan gelar Sarjana Administrasi Publik pada STIA-NUSA Sungai Penuh.

1.4.2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat akademis dalam penelitian ini yaitu :

- a. Memberikan informasi bagi Pemerintah Desa Panca Mulya tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- b. Sebagai informasi bagi Pemerintah Desa Panca Mulya tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa yang telah dilaksanakan.

1.5. Tinjauan Pustaka

Untuk memudahkan pembahasan terhadap permasalahan, maka dipandang perlu mengemukakan beberapa definisi-definisi, konsep-konsep, literatur-literatur yang ada hubungan dan kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

1.5.1 Otonomi Daerah

Menurut Rudini dalam Silalahi (2000:48), Otonomi daerah adalah kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri terutama berkaitan dengan pemerintahan umum maupun pembangunan, yang sebelumnya diurus pemerintahan pusat. Untuk itu, selain diperlukan kemampuan keuangan, diperlukan juga adanya sumber daya manusia berkualitas, sumber daya alam, modal, dan teknologi.

1.5.2 Tujuan Otonomi Daerah

Tujuan otonomi daerah menurut Smith (2001:15) dalam analisa CSIS yang dikemukakan oleh Syarif Hidayat dibedakan dari dua sisi kepentingan, yaitu kepentingan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dari kepentingan Pemerintah Pusat tujuan utamanya adalah pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, menciptakan stabilitas politik dan mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah.

1.5.3 Desentralisasi

Menurut Mahfud dalam Simanjuntak (2013:66), desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerah mulai dari kebijakan, perencanaan sampai implementasi dan pembiayaan dalam rangka demokrasi. Sementara itu, otonomi adalah wewenang yang dimiliki daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan dan dalam rangka desentralisasi.

1.5.4 Pengertian Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village yang diartikan sebagai “ *a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town* “. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” (2004:22), menyatakan bahwa Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

1.5.5 Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa merupakan suatu kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pemerintahan Desa menurut (Prof. Drs. HAW Widjaja 2003:3) dalam bukunya “Otonomi Desa” Pemerintahan Desa diartikan sebagai : Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan Subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab ke Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut ke Bupati.

1.5.6 Pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan berasal dari penerjemahan Bahasa Inggris yaitu “empowerment”, yang bermakna “pemberian kekuasaan” karena power bukan sekedar “gaya” tapi juga merupakan “kekuasaan”, sehingga kata “daya” tidak hanya bermakna “mampu” tapi juga “mempunyai kuasa”

Wrihatnolo dan Dwidjowijoto, (2007: 74), mengemukakan bahwa “konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian community development (pembangunan masyarakat) dan community based development (pembangunan yang bertumpu pada masyarakat), dan tahap selanjutnya muncul istilah community driven development yang diterjemahkan sebagai pembangunan yang diarahkan masyarakat atau diistilahkan sebagai pembangunan yang digerakkan oleh masyarakat...”

1.5.7 Dampak Otonomi Daerah bagi Desa

Simanjuntak (2013:51) menyatakan bahwa Kehadiran arus reformasi yang berhasil membawa era keterbukaan bagi masyarakat, kemudian membawa implikasi pada terbukanya berbagai tanggapan serta protes-protes masyarakat akan berbagai macam hal termasuk perbaikan pola hubungan Negara dan Masyarakat. Dalam era ini merupakan sebuah kewajaran kemudian apabila masyarakat di daerah menuntut agar pola hubungan antara Pusat dan Daerah diperbaharui kearah yang lebih demokratis. Utamanya menyangkut berbagai hal dalam penataan daerah, termasuk proporsipembagian hasil-hasil dari pemanfaatan sumber daya alam yang ada di daerah antara Pemerintah Pusat dan Daerah, agar masyarakat di daerah dapat lebih menikmati hasil-hasilnya.

1.5.8 Kebijakan Otonomi Daerah dan Penerimaan Masyarakat

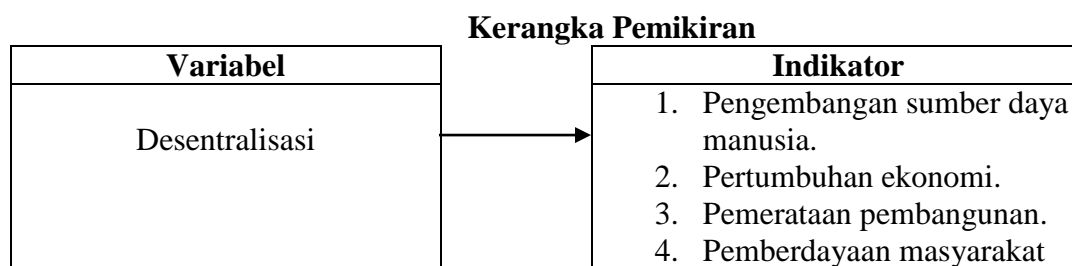
Selain karena dianggap akan membawa manfaat bagi masyarakat di daerah, tanggapan masyarakat desa tentang Otonomi Daerah adalah bahwa hal tersebut harus diterima karena sudah merupakan Peraturan Pemerintah dalam wujud Undang-undang. Melalui kebijakan Otonomi Daerah yang berartibahwa Pemerintah Daerahlah kemudian yang akan sangat menentukan bagaimana kebijakan Otonomi Daerah ini akan dapat menguntungkan dan bermanfaat bagi masyarakat di wilayahnya. Jika Pemerintah Daerah melalui kebijakan Otonomi Daerah kemudian mempunyai wewenang yang luas dalam menata wilayahnya, maka Pemerintah Daerah tentu akan dapat memajukan masyarakat sesuai dengan kondisi masyarakatnya.

1.6. Kerangka Pemikiran

Menurut Wahyudi Kumorotomo (2002:24), pelaksanaan otonomi daerah melalui desentralisasi yang dilaksanakan di desa, dapat dilihat dari beberapa indikator pelaksanaan desentralisasi yang dijadikan tolok ukur keberhasilan diantaranya yaitu :

1. Pengembangan sumber daya manusia.
2. Pertumbuhan ekonomi.
3. Pemerataan pembangunan.
4. Pemberdayaan masyarakat

Gambar 1.1



Sumber : Wahyudi Kumorotomo (2002:24)

II Metode Penelitian

2.1 Pendekatan Penelitian

Untuk menganalisis Pelaksanaan Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa Panca Mulya Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi dalam penelitian ini penulis menggunakan Pendekatan kualitatif yaitu analisa yang berdasarkan teori-teori yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

Menurut Bogman dan Taylor dalam bukunya Lexy J. Moleong (2002:8) bahwa Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

2.2. Informan Penelitian dan Teknik Penentuan Informan

Informan penelitian adalah orang yang benar-benar mengetahui atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive sampling. Menurut Sugiono (2017:96) Purposive sampling adalah dimana sampel diambil dengan pertimbangan tertentu. Dengan mempertimbangkan bahwa orang bahwa orang yang diambil sebagai sampel merupakan orang-orang yang mengetahui dan terlibat langsung dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa Panca Mulya Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi. Sehingga peneliti mendapatkan informasi yang valid dari pengetahuannya dan pengalaman dalam menentukan responden penelitian.

Dari informan kunci ini (*Key informan*) akan di telusuri informan lainnya yang memahami permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Informan dalam penelitian ini ditunjuk secara Purposive. Informan yang ditunjuk ditentukan kriterianya yaitu sejauh mana mereka memahami masalah yang dikaji sebagaimana yang dirumuskan dalam pernyataan penelitian. Kemudian dalam prosesnya akan ditetapkan beberapa informan. Adapun jumlah informan dalam penelitian ini adalah 8 orang

Menurut Sugiyono (2012:145) untuk memilih informan sebaiknya yang memenuhi kriteria adalah sebagai berikut :

1. Subjek yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui tetapi juga dihayati.
2. Subjek yang tergolong masih berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti.
3. Subjek yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi.
4. Subjek yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil kemasannya sendiri.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1
Daftar Informan

No.	Nama	Jabatan

1.	Gusmanto Torik	Kades
2.	Yusman	Sekdes
3.	Herman Pelani	Kasi Pemerintahan
4.	Adi Kurnia Putra, S.Pd	Kasi Kesejahteraan
5.	Muhammad Malik, A.Md	Kasi Pelyanan
6.	Triola Yolanda, ST	Kaur Perencanaan
7.	Sukaimi	BPD
8.	Lukman Haris	BPD

2.3. Data yang Diambil

Jenis data yang akan diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer yaitu data yang didapatkan langsung dari objek penelitian melalui wawancara mendalam dengan informan. Dan dengan cara observasi lapangan dari lembaga yang terkait.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari laporan-laporan yang didapatkan Di Desa Panca Mulya Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi

2.4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

2.4.1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu :

1. *Interview*/wawancara mendalam dengan para informan.
Dalam pengumpulan data untuk mengetahui permasalahan, peneliti melakukan wawancara secara mendalam dengan informan yang sudah ditunjuk dengan merujuk kepada pedoman wawancara yang sudah peneliti persiapkan sebelumnya.
2. Perpustakaan
Teknik kepustakaan adalah “penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan.

2.4.2. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu :

1. Rekaman/HP
2. Pena
3. Buku
4. Laptop

2.5. Unit Analisis

Sesuai dengan judul penelitian bahwa yang akan diteliti adalah mengenai Pelaksanaan Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa Panca Mulya Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi, maka yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah Desa Panca Mulya Kecamatan Sungai Bahar.

2.6. Interpretasi Data

Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan foto-foto sebagai pendukung. Setelah data-data ini diperoleh peneliti, maka akan dilakukan analisis data menggunakan pendekatan interpretif, dimana peneliti menginterpretasikan arti data-data yang telah dikumpulkan dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu. Adapun tahapan-tahapan

analisis data dalam penelitian ini sesuai dengan analisis data kualitatif model Miles dan Huberman dalam sugiono (2017:91), yaitu sebagai berikut :

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan kegiatan mengumpulkan data dilapangan baik melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Data-data tersebut diperoleh dari sumber-sumber yang telah dipilih. Data yang dikumpulkan tersebut adalah data yang berkaitan dengan penelitian.

2. *Data Reduction*

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Kegiatan ini bertujuan untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuat hal-hal yang penting yang muncul dari catatan dan pengumpulan data. Proses ini berlangsung terus menerus sampai laporan akhir penelitian selesai.

3. *Data Display* (Penyajian data)

Penyajian dalam penelitian kualitatif dimaksudkan untuk menemukan suatu makna dari kata-kata yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis dan logis dari bentuk informasi yang kompleks menjadi sederhana namun selektif sehingga bisa lebih mudah dipahami. Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

4. *Conclusion Drawing/verifikasi* (Pengarikan kesimpulan)

Mengambil kesimpulan merupakan langkah analisis setelah pengolahan data. Kesimpulan yang diambil mungkin masih terasa kabur dan diragukan. Oleh karena itu, perlu dilakukan verifikasi kesimpulan tersebut dengan mencari data-data lain yang dapat mendukung kesimpulan tersebut serta mengecek ulang data-data yang telah diperoleh.

2.7. Pengujian Keabsahan Data

Wiliam Wiersma (2000:23) mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu (Sugiyono, 2007:273).

1. Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (membercheck) dengan tiga sumber data (Sugiyono, 2007:274).

2. Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar (Sugiyono, 2007:274).

3. Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu

atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya (Sugiyono, 2007:274).

2.8. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Desa Panca Mulya Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi. Pemilihan dengan pertimbangan bahwa adanya kesediaan dari instansi yang bersangkutan untuk memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.

III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengembangan sumber daya manusia

Sebagai salah satu sumber daya yang dimiliki organisasi, sumber daya manusia (SDM) merupakan sumber daya yang terpenting untuk pencapaian sasaran organisasi. Peranan SDM bagi organisasi tidak hanya dapat dilihat dari hasil produktivitas kerja saja tetapi juga dapat dilihat dari kualitas kerja yang dihasilkan dan kemampuan untuk memanfaatkan secara tepat sumber daya lainnya untuk kepentingan organisasi. Bahkan lebih jauh lagi kalau dilihat secara makro keunggulan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kemampuan daya saing SDM-nya, bukan lagi ditentukan oleh sumber daya alam yang dimiliki. Semakin kuat kemampuan daya saing/kompetitif SDM-nya, maka semakin kuat posisi Negara tersebut dalam memberikan pelayanan. Kondisi ini juga berlaku dalam lingkup internal suatu negara yang dalam melaksanakan roda pemerintahan sebagian kekuasaannya diserahkan pada pemerintahan masing-masing daerah (otonomi daerah) sehingga dimungkinkan antar pemerintahan daerah melakukan suatu “persaingan” untuk memakmurkan daerahnya.

Pemerintahan Desa Panca Mulya Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi dalam pengembangan sumber daya manusia melakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah dengan mengikut sertakan anggota masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan. Hal ini berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Gusmanto Torik, selaku Kepala Desa :

“Dalam upaya membangun sumber daya manusia di desa kami Panca Mulya dilakukan dengan mengikut sertakan seluruh anggota masyarakat yang kita anggap memiliki kesanggupan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan ini dilakukan dalam bentuk berbagai kegiatan desa yang ada, baik laki-laki maupun perempuan.” (*Hasil wawancara dengan Bapak Gusmanto Torik, 29-7-2020 Pukul 08.30 WIB*)

Hal ini senada dengan wawancara peneliti dengan Bapak Adi Kurnia Putra, S.Pd, selaku Kasi Kesejahteraan :

“Pembangunan Sumber Daya Manusia di Desa Panca Mulya, dilakukan dengan melibatkan anggota masyarakat dalam kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik, dan itu dilakukan sesuai dan seiring dengan program pembangunan desa.” (*Hasil wawancara dengan Bapak Adi Kurnia Putra, S.Pd, 29-7-2020 Pukul 08.40 WIB*)

Dengan aktifnya anggota masyarakat dalam pembangunan desa, diharapkan sumber daya manusia di Desa Panca Mulya menjadi manusia yang berkualitas dan mandiri sehingga bisa diandalkan dan terlibat dalam berbagai kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik. Hal ini berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Triola Yolanda, ST, selaku Kaur Perencanaan :

“Bentuk upaya pembangunan sumber daya manusia, anggota masyarakat dilibatkan dalam kegiatan fisik seperti pembangunan jalan setapak, pembangunan

gedung serba guna untuk yang bapak-bapaknya. Sementara untuk ibu-ibu ada kegiatan PKK, sering juga ikut lomba-lomba desa dan banyak lagi.” (*Hasil wawancara dengan Bapak Triola Yolanda, ST, 30-7-2020 Pukul 11.00 WIB*)

Keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan desa sebagai wujud pembangunan sumber daya manusia dilakukan sesuai dengan program kerja pemerintah desa. Hal ini dilakukan menyesuaikan dengan kebutuhan desa baik fisik maupun non fisik. Dengan demikian pembangunan bisa dilakukan secara simultan, dimana satu sisi pembangunan desa baik fisik maupun non fisik dapat terealisasi sementara sumber daya manusia juga dapat dilakukan secara bersamaan.

Hal ini berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Muhammad Malik, A.Md, selaku Kasi Pelayanan :

“Pembangunan sumber daya manusia itukan dilakukan secara bersamaan sesuai dengan program pembangunan desa. Kalau ada pembangunan seperti pembangunan gedung maka anggota masyarakat yang terlibat kita bekali dengan arahan-arahan pentingnya kualitas pembangunan. Begitu pula untuk non fisik, sering kami mengadakan kegiatan pelatihan untuk ibu-ibu yang sifatnya menambah pengetahuan, seperti pelatihan masak, pelatihan kader PKK dan sebagainya. (*Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Malik, A.Md, 30-7-2020 Pukul 10.45 WIB*)

Pernyataan ini diperjelas oleh Bapak Yusman selaku Sekretaris Desa :

“Untuk menambah pengetahuan masyarakat maka anggota masyarakat sering dilibatkan dalam berbagai kegiatan pelatihan-pelatihan baik yang kami adakan di desa maupun kami kirim ke kecamatan dan kabupaten. Setelah itu hasilnya, kami minta untuk mengajarkan pada anggota masyarakat yang lain.” (*Hasil wawancara dengan Bapak Yusman, 28-9-2012 Pukul 08.30 WIB*)

Uraian diatas dan berdasarkan hasil wawancara dengan informan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Dimana upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa selalu melibatkan anggota masyarakatnya dalam setiap kegiatan pembangunan desa. Hal ini sangat bermanfaat bagi pembangunan Pengembangan sumber daya manusia di Desa Panca Mulya Kecamatan Sun gai Bahar Kabupaten Muro Jambi.

3.2.Pertumbuhan Ekonomi

Analisis pada Pertumbuhan ekonomi berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dan juga berdasarkan obsevasi peneliti. Dimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa Panca Mulya dimana pemerintah desa melaksanakan berbagai penyuluhan, salah satunya dengan melaksanakan penyuluhan perkebunan tentang bagaimana melakukan pemupukan sawit yang benar, bagaimana melakukan penyemprotan yang benar. Hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat Panca Mulya adalah petani sawit.

Dengan adanya penyuluhan dari pihak-pihak terkait yang diadakan oleh pemerintah desa, diharapkan mampu meningkatkan hasil panen masyarakat yang secara otomatis akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini berdasarkan wawancara peneliti dengan Adi Kurnia Putra, S.Pd, selaku Kasi Pemberdayaan :

“Kami dari pemerintah desa pada dasarnya selalu mengupayakan bagaimana ekonomi masyarakat bisa tumbuh dan meningkat. Untuk itu kami selalu melaksanakan kegiatan penyuluhan perkebunan, ya karena masyarakat kitakan mayoritas berkebun sawit.” (*Hasil wawancara dengan Adi Kurnia Putra, S.Pd, 2-8-2020 Pukul 14.00 WIB*)

Hal ini diperkuat dengan wawancara peneliti dengan Sukaimi, selaku anggota BPD

:

“Pemerintah desa saya perhatikan telah berusaha dengan sebaik mungkin dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Masyarakat sering dibekali dengan pengetahuan tentang bagaimana merawat sawit yang benar melalui penyuluhan-penyuluhan, dan itu dilakukan paling tidak sekali selama tiga bulan.” (*Hasil wawancara dengan Sukaimi, 4-8-2020 Pukul 14.15 WIB*)

Disamping penyuluhan-penyuluhan perkebunan, pemerintah Desa Panca Mulya juga melakukan langkah dengan memberikan bantuan bibit sawit dan pupuk melalui koperasi desa. Ini dimaksudkan agar bisa meringankan beban petani, mengingat bibit sawit yang baik sangat sulit didapatkan. Hal ini berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Gusmanto Torik, selaku Kepala Desa :

“Dalam upaya membantu meningkatkan ekonomi masyarakat, kami dari pemerintah desa memberikan bantuan bibit sawit dan pupuk secara berkala dalam kurun waktu 2 bulan sekali. Ini dengan pertimbangan dimana bibit sawit yang baik sangat sulit didapat, sementara pupuk kadang-kadang sangat langka.” (*Hasil wawancara dengan Gusmanto Torik, 4-8-2020 Pukul 08.40 WIB*)

Dari hasil wawancara dengan informan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Dimana pemerintah desa selalu mengupayakan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan melaksanakan penyuluhan-penyuluhan dan membantu mempermudah masyarakat dalam mendapatkan bibit sawit dan pupuk.

3.3. Pemerataan Pembangunan

Analisis indikator pemerataan pembangunan di Desa Panca Mulya kegiatannya lebih kepada penekanan pembangunan secara umum. Dimana pembangunan disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan berdasarkan skala prioritas. Hal ini berdasarkan wawancara peneliti dengan Lukman Haris, selaku BPD :

“Kalau untuk pemerataan pembangunan itu sudah kita musyawarahkan, baik saat Musrembangdes maupun rapat-rapat lain. Dimana pembangunan harus dilakukan berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas. Ini dengan pertimbangan tidak semua lokasi pembangunan membutuhkan hal yang sama.” (*Hasil wawancara dengan Lukman Haris, 8-8-2020 Pukul 08.30 WIB*)

Hal ini juga berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Yusman, selaku Sekretaris Desa :

“Selama ini pemerintah desa selalu konsisten dengan hasil kesepakatan bersama terutama diMusrembangdes. Seperti jalan setapak, itu kita bangun sesuai dengan yang memang dibutuhkan masyarakat. Jadi kalau kita anggap belum begitu mendesak untuk dibangun maka kita tunda untuk anggaran pembangunan berikutnya.” (*Hasil wawancara dengan Bapak Yusman, 8-8-2020 Pukul 08.40 WIB*)

Kemudian pemerataan pembangunan di Desa Panca Mulya, dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan pembangunan fisik dan pemberdayaan. Namun demikian prinsip kebutuhan dan skala prioritas tetap menjadi acuan dalam melakukan pemerataan pembangunan.

Hal ini berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Herman Pelani, selaku Kasi Pemerintahan :

“Kalau untuk urusan pemerataan pembangunan kami tetap berdasarkan kebutuhan masyarakat dan skala prioritas. Namun perimbangan antara pembangunan fisik dan pemberdayaan tetap menjadi perhatian. Jadi bisa jadi pembangunan fisik lebih banyak dari pemberdayaan atau sebaliknya. Namun kedua-duanya tetap dilaksanakan secara bersamaan.” (*Hasil wawancara dengan Herman Pelani, 10-8-2020 Pukul 14.15 WIB*)

Pernyataan ini didukung oleh Bapak Triola Yolanda, ST selaku Kaur Perencanaan :

“Program kerja kami selama ini, sangat mempertimbangkan hal-hal yang mendesak dan penting untuk dibangun. Jadi pemerataan itu tidak dilakukan berdasarkan keinginan masyarakat tapi berdasarkan kebutuhan yang mendesak dilapangan.” (*Hasil wawancara dengan Triola Yolanda, ST, 10-8-2020 Pukul 14.30 WIB*)

Kemudian Bapak Gusmanto Torik, selaku Kepala Desa juga menyatakan :

“Saat ini pembangunan fisik dilaksanakan lebih banyak dibandingkan pemberdayaan, karena memang di desa kita ini pembangunan fisik merupakan kebutuhan yang mendasar terutama jalan setapak untuk memobilisasi hasil panen. Namun demikian pembangunan pemberdayaan tetap tidak bisa kita abaikan, karena kedua-duanya sama-sama penting. Hanya ada yang mungkin memang dibutuhkan dan mendesak serta ada yang kita anggap bisa dilaksanakan secara bertahap.” (*Hasil wawancara dengan Gusmanto Torik, 11-8-2020 Pukul 15.20 WIB*).

3.4. Pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat di Desa Panca Mulya Analisis indikator pemerataan pembangunan di Desa Panca Mulya merupakan sesuatu yang selalu digalakkan dan dilaksanakan. Hal ini sebagai bentuk upaya memanfaatkan potensi yang ada dalam lingkup Desa Panca Mulya.

Pemberdayaan masyarakat di Desa Panca Mulya, dilakukan dengan komitmen dimana setiap kegiatan desa harus menggunakan jasa masyarakat setempat. Hal ini berdasarkan wawancara peneliti dengan Gusmanto Torik, selaku Kepala Desa :

“Kita di Desa Panca Mulya lebih mengutamakan potensi orang-orang masyarakat desa kita sendiri disetiap kegiatan-kegiatan desa. Ini kita maksudkan agar pembangunan di desa kita tidak hanya maju secara fisik, tapi juga bermanfaat bagi masyarakat terutama sebagai tambahan penghasilan masyarakat.” (*Hasil wawancara dengan Lukman Haris, 9-8-2020 Pukul 08.30 WIB*)

Hal ini juga berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Herman Pelani, selaku Kasi Pemerintahan :

“Setiap kegiatan, kita selalu melibatkan orang-orang desa kita sendiri. Umpamanya ada pembangunan gedung maka mulai dari materi sampai kepada pekerja (tukang) itu kita berdayakan masyarakat kita sendiri, terkecuali yang kita anggap tidak bisa dilakukan oleh salah seorang masyarakat kita. Sepanjang masih ada maka masyarakat kita yang lebih utama” (*Hasil wawancara dengan Bapak Herman Pelani, 9-8-2020 Pukul 08.40 WIB*).

Hal ini senada dengan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Sukaimi, selaku Anggota BPD :

“Alhamdulillah, masyarakat kita selalu terlibat disetiap pembangunan di desa kita, baik fisik maupun non fisik. Karena keterlibatan mereka mampu memberi banyak kebaikan baik secara ekonomi, kemasyarakatan dan pemerintahan.” (*Hasil wawancara dengan Sukaimi, 10-8-2020 Pukul 14.15 WIB*)

Pernyataan ini didukung oleh Bapak Triola Yolanda, ST selaku Kaur Perencanaan :

“Sampai saat ini, masyarakat selalu dilibatkan dalam setiap kegiatan. Kemarin ada pembangunan gedung serba guna yang anggarannya dari dana DD, semua pekerja, semua material mulai dari pasir, kayu, semen dan sebagainya, kita minta masyarakat kita yang mengadakannya.” (*Hasil wawancara dengan Triola Yolanda, ST, 9-8-2020 Pukul 14.30 WIB*)

Kemudian Bapak Lukman Haris, selaku Anggota juga menyatakan :

“Biasanya sewaktu musrembangdes, kami sudah tentukan secara bersama-sama siapa-siapa saja yang akan terlibat dalam pembangunan desa. Dan itu tentu kita tidak paksakan dan tentukan sendiri tapi bagi yang bersedia dan diputuskan secara bersama-sama oleh pemerintah desa, BPD dan masyarakat.” (*Hasil wawancara dengan Gusmanto Torik, 12-8-2020 Pukul 15.20 WIB*).

IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan dan dituangkan dalam skripsi ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian indikator Pengembangan sumber daya manusia sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintahan desa selalu melibatkan anggota masyarakatnya dalam setiap kegiatan pembangunan desa. Hal ini sangat bermanfaat bagi pembangunan Pengembangan sumber daya manusia di Desa Panca Mulya Kecamatan Sun gai Bahar Kabupaten Muro Jambi.
2. Hasil penelitian indikator Pertumbuhan ekonomi sudah dilaksanakan dengan baik. Dimana pemerintah desa selalu mengupayakan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan melaksanakan penyuluhan-penyuluhan dan membantu mempermudah masyarakat dalam mendapatkan bibit sawit dan pupuk.
3. Hasil penelitian indikator pemerataan pembangunan sudah dilaksanakan dengan baik. Dimana pemerataan pembangunan dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan berdasarkan skala prioritas. Disamping itu pemerataan pembangunan dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan pembangunan fisik dan pembangunan pemberdayaan masyarakat.
4. Hasil penelitian untuk indikator pemerataan pembangunan di Desa Panca Mulya. Dimana pemberdayaan dilakukan dengan melibatkan seluruh masyarakat yang memiliki potensi dalam setiap kegiatan pembangunan desa.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, maka penulis menyarankan kepada Pemerintah Desa Panca Mulya, yaitu :

1. Hendaknya orang-orang yang memiliki kemampuan dan keahlian betul-betul diarahkan untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang perkebunan yang baik.
2. Peneliti menyarankan, hendaknya pertumbuhan ekonomi masyarakat dilakukan mengadakan mobil pengangkut hasil panen milik masyarakat melalui koperasi, ini untuk menghemat biaya ongkos pengangkutan.
3. Pemerataan pembangunan sudah sangat bagus, dan hendaknya dipertahankan dimasa-masa mendatang.
4. Pemberdayaan masyarakat hendaknya ditingkatkan lagi melalui keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada yang telah mensupport dan membantu penulis sehingga jurnal ini dapat disusun dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abdussakur, (2012), *Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*, Jakarta, Diksi Insan Mulia
- Anwar, Misbahul, 2011, *Teori Administrasi Publik*, Bandung, Alfabeta

- Bryan, dkk dalam Simanjuntak, 2013, *Desentralisasi dan Demokrasi*, Jakarta, Erlangga
- Lexy J. Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya
- Mahfud dalam Simanjuntak, 2013, *Desentralisasi dan Demokrasi*, Jakarta, Erlangga
- Rondinelli, dkk dalam Simanjuntak, 2013, *Desentralisasi dan Demokrasi*, Jakarta, Erlangga
- Rudini dalam Silalahi (2000), *Otonomi Daerah*, Jakarta Mandar Maju
- Silalahi (2000), *Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Surabaya, Liberty
- Smith, 2001, *Sistem Administrasi Pemerintahan Di Daerah*, Jakarta, Bumi Aksara
- Sugiono, 2017, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung, Alfabeta
- Supriyatna dalam Simanjuntak, 2013, *Desentralisasi dan Demokrasi*, Jakarta, Erlangga
- Soetomo, 2011, *Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Wahyudi Kumorotomo, 2002, *Akuntabilitas Birokrasi Publik*, Yogyakarta, Fakultas Hukum UII
- Widjaya HAW, 2004, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Bandung, Mandar Maju
- Wrihatnolo dan Dwidjowijoto, 2007, *Manajemen Pemberdayaan*, Jakarta, PT Elex. Media Komputindo
- Zakaria dalam Candra Kusuma, 2003, *Membangun Good Governance di Desa*, Jakarta, CV.Cipruy
- Zemmerman dalam Wrihatnolo dan Dwidjowijoyo, 2007, *Manajemen Pemberdayaan*, Jakarta, PT Elex. Media Komputindo
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1
- Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 tentang DesaS